

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan berkelanjutan karena berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengurangan ketimpangan sosial ekonomi. Pembangunan berkelanjutan global yang dirumuskan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) menempatkan isu pangan sebagai salah satu prioritas utama. Khususnya pada SDGs Tujuan 2: *Zero Hunger*, dunia berkomitmen untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan. Target ini menekankan bahwa setiap negara harus memastikan seluruh penduduknya memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

Di tingkat nasional, Indonesia telah mengintegrasikan SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Meskipun demikian, permasalahan ketidakcukupan konsumsi pangan masih menjadi tantangan yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa capaian konsumsi energi penduduk Indonesia belum sepenuhnya merata antarwilayah dan kelompok pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan akses dan daya beli masyarakat terhadap pangan. Di Indonesia, pencapaian tujuan tersebut sangat penting karena

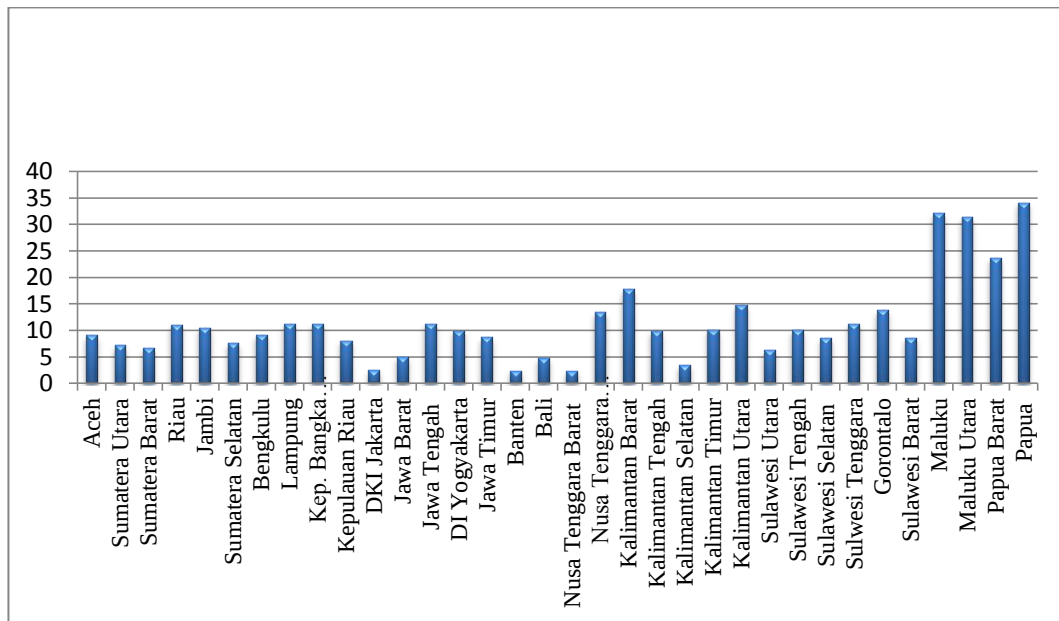
ketahanan pangan merupakan fondasi bagi pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengurangan kemiskinan. Kecukupan pangan tidak hanya dipandang sebagai ketersediaan komoditas bahan makanan, tetapi juga berkaitan dengan akses, distribusi, stabilitas harga, hingga kualitas konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, upaya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan pangan, termasuk ketidakcukupan konsumsi pangan, menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan tujuan pembangunan nasional dan global. Di Indonesia, isu ketahanan pangan mendapatkan perhatian khusus karena masih adanya ketimpangan konsumsi antarwilayah, terutama pada provinsi-provinsi kepulauan dan wilayah timur Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (2023), *undernourishment* atau ketidakcukupan konsumsi pangan dapat dijelaskan sebagai kondisi di mana seseorang secara teratur mengonsumsi sejumlah makanan, tetapi jumlah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi yang diperlukan untuk menjalani kehidupan normal, aktif, dan sehat. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menggambarkan proporsi penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan energi minimum hariannya. Ketidakcukupan konsumsi pangan adalah kondisi ketika konsumsi energi seseorang berada di bawah standar 2.100 kkal per kapita per hari. Sementara itu, *Food and Agriculture Organization* (FAO) mendefinisikan *prevalence of undernourishment* sebagai persentase penduduk yang asupan energinya berada di bawah kebutuhan energi minimum untuk menjalani aktivitas fisik yang normal. Kedua definisi tersebut menegaskan bahwa masalah ketidakcukupan konsumsi pangan bukan hanya terkait jumlah

pangan yang tersedia, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan yang layak.

Permasalahan ketidakcukupan konsumsi pangan cenderung lebih menonjol di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan kondisi sosial ekonomi yang relatif tertinggal, seperti kawasan timur Indonesia. Provinsi Maluku, sebagai wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang unik, menjadi salah satu daerah yang memerlukan perhatian khusus terkait isu akses pangan dan kerentanannya. Kondisi ini menyebabkan akses pangan masyarakat sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan distribusi, fluktuasi harga bahan pokok, dan ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) di Provinsi Maluku berada pada level yang relatif tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain.

Provinsi Maluku menduduki peringkat kedua provinsi yang menunjukkan ketidakcukupan konsumsi pangan nya tinggi setelah Provinsi Papua. Ditinjau selama 5 tahun terakhir, tiga Provinsi dengan rata-rata prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *poU* tertinggi di Indonesia, yaitu Provinsi Papua, Maluku, Maluku Utara. Dengan Provinsi Papua yang paling tinggi yaitu sebesar 33,34 persen, Maluku sebesar 31,75 persen, dan Maluku Utara sebesar 30,61 persen. Sementara Provinsi dengan rata-rata prevalensi ketidakcukupan konsumsi nya paling rendah yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai sebesar 2,38 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah (2026)

Gambar 1.1 Rata-Rata Ketidacukupan Konsumsi Pangan Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2024 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.1, menunjukkan data rata-rata ketidacukupan konsumsi pangan seluruh provinsi di Indonesia. Menunjukkan bahwa Provinsi Maluku masih menghadapi tantangan signifikan terkait ketidacukupan konsumsi pangan. Dalam periode 2019–2024, ketidacukupan konsumsi pangan di Maluku berada pada tingkat yang relatif tinggi dibanding rata-rata nasional. Beberapa kabupaten/kota mengalami peningkatan ketidacukupan konsumsi pangan di tengah fluktuasi kondisi sosial ekonomi dan perubahan harga komoditas strategis.

Tingginya ketidacukupan konsumsi pangan di Provinsi Maluku tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan sumber daya pangan, melainkan lebih dipengaruhi oleh permasalahan akses dan daya beli masyarakat. Sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki kondisi geografis yang tersebar dan didominasi wilayah laut, sehingga distribusi pangan antar pulau menjadi tidak efisien dan

berbiaya tinggi. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan pangan tidak merata serta harga bahan pangan relatif lebih mahal dibandingkan daerah lain, terutama di wilayah terpencil. Harga pangan yang tinggi pada akhirnya membatasi kemampuan rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin, dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang cukup baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Selain itu, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi di Maluku turut memperburuk kondisi konsumsi pangan masyarakat. Rumah tangga miskin cenderung memiliki pengeluaran yang terbatas sehingga alokasi belanja untuk pangan tidak mencukupi kebutuhan energi minimum. Rumah tangga sering kali mengurangi jumlah konsumsi atau memilih pangan yang murah namun kurang bergizi, yang berdampak langsung pada tingginya ketidakcukupan konsumsi pangan. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Onime et al (2021) yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketidakcukupan konsumsi pangan, ketika tingkat kemiskinan meningkat maka ketidakcukupan konsumsi pangan juga akan ikut meningkat.

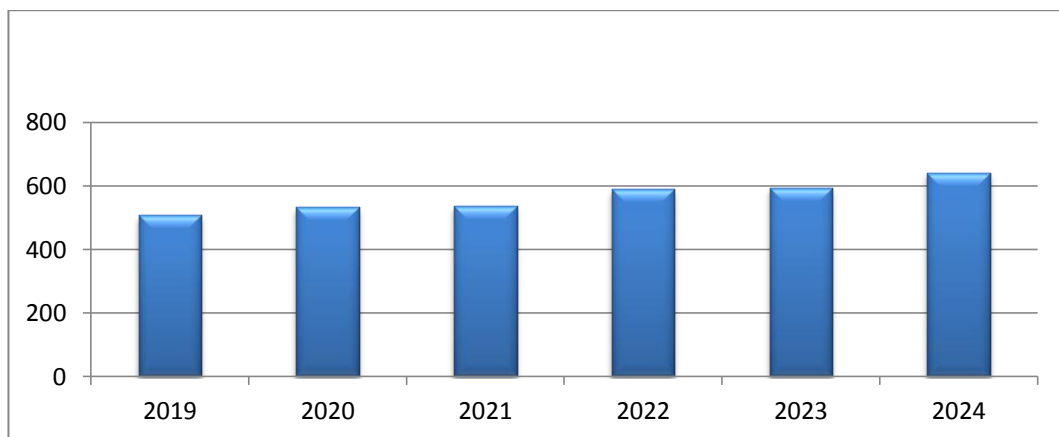
Di sisi lain, pola konsumsi pangan masyarakat Maluku yang masih kurang beragam juga berkontribusi terhadap tingginya ketidakcukupan konsumsi pangan. Ketergantungan yang tinggi pada beras sebagai pangan utama, disertai dengan menurunnya pemanfaatan pangan lokal seperti sagu dan umbi-umbian, membuat ketahanan pangan rumah tangga menjadi rentan terhadap gangguan pasokan dan fluktuasi harga. Meskipun Maluku memiliki potensi perikanan yang besar, pemanfaatannya untuk konsumsi rumah tangga belum optimal karena sebagian hasil tangkapan dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Akibatnya, potensi

sumber pangan yang melimpah tidak sepenuhnya tercermin dalam tingkat konsumsi energi dan gizi masyarakat.

Fenomena ketidakcukupan konsumsi pangan di provinsi Maluku ini dapat dijelaskan melalui berbagai teori ekonomi dan sosial. Salah satunya yaitu teori Entitlement yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1996) menyatakan bahwa kelaparan bukan disebabkan oleh kurangnya ketersediaan pangan, tetapi karena lemahnya entitlements atau kemampuan seseorang memperoleh pangan melalui pendapatan, aset, atau bantuan sosial. Di Maluku, masyarakat dengan pendapatan rendah atau tidak memiliki akses kerja formal mungkin mengalami penurunan *exchange entitlement*, sehingga tidak mampu membeli pangan walaupun secara fisik pangan tersedia.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor determinan ketidakcukupan konsumsi pangan menjadi sangat penting untuk mendukung perumusan kebijakan ketahanan pangan yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap kondisi daerah. Salah satu variabel penting yang memengaruhi tingkat kecukupan konsumsi pangan adalah pengeluaran perkapita makanan. Pengeluaran ini merupakan cerminan kemampuan ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan konsumsi harian. Merujuk pada penelitian Ritonga et al (2025) yang menyatakan pengeluaran makanan berpengaruh negatif terhadap ketidakcukupan konsumsi pangan. Semakin rendah pengeluaran makanan, semakin besar risiko rumah tangga mengalami ketidakcukupan konsumsi energi. Hal ini sejalan dengan Hukum Engel (1857) yang menyatakan bahwa semakin rendah pendapatan seseorang, semakin besar proporsi pendapatannya yang digunakan untuk

konsumsi pangan. Namun, meskipun proporsinya besar, rumah tangga berpendapatan rendah tetap memiliki keterbatasan dalam jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah (2026)

Gambar 1.2 Pengeluaran Makanan Perkapita Per bulan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 (Ribu Rupiah)

Grafik 1.2 menunjukkan perkembangan rata-rata pengeluaran makanan perkapita di Provinsi Maluku selama periode 2019 sampai 2024. Secara umum, terlihat adanya tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, rata-rata pengeluaran makanan perkapita berada di kisaran sekitar 500 ribu rupiah. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 terjadi kenaikan secara bertahap, meskipun peningkatannya tidak terlalu besar, yaitu berada di atas 520 ribu hingga sekitar 530 ribu rupiah.

Memasuki tahun 2022, kenaikan terlihat lebih signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana pengeluaran makanan perkapita mendekati 580 ribu rupiah. Tren peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2023 yang hampir mencapai sekitar 600 ribu rupiah. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, dengan

nilai sekitar 640 ribu rupiah, yang menjadi angka tertinggi selama periode pengamatan.

Jika dilihat secara keseluruhan, grafik 1.2 menggambarkan bahwa kemampuan atau kecenderungan masyarakat dalam membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhan makanan terus meningkat setiap tahun. Kenaikan ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti inflasi harga bahan makanan, peningkatan pendapatan masyarakat, atau perubahan pola konsumsi. Tidak terlihat adanya penurunan dalam periode tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran makanan per kapita di Provinsi Maluku menunjukkan tren yang konsisten meningkat dari tahun 2019 hingga 2024.

Ketika daya beli rendah, rumah tangga cenderung mengurangi kuantitas maupun kualitas makanan yang dikonsumsi sehingga memengaruhi kecukupan energi harian. Penelitian Puja et al (2025) menyatakan bahwa pengeluaran pangan memiliki pengaruh negatif terhadap ketidakcukupan konsumsi pangan. Hal ini menunjukkan ketika jumlah pengeluaran perkapita makanan naik maka akan menurunkan ketidakcukupan konsumsi pangan, sebaliknya jika pengeluaran perkapita turun maka akan meningkatkan ketidakcukupan konsumsi pangan. Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Sopiyan et al (2025) menyatakan bahwa pengeluaran makanan memiliki pengaruh negatif terhadap ketidakcukupan konsumsi pangan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Nisa et al (2024) menunjukkan hasil berbeda yang menyatakan bahwa pengeluaran makanan perkapita berpengaruh positif terhadap ketidakcukupan konsumsi pangan.

Selain itu, karakteristik wilayah Maluku sebagai daerah kepulauan juga memengaruhi besarnya pengeluaran makanan. Keterbatasan produksi pangan lokal di beberapa wilayah serta tingginya biaya transportasi antar pulau menyebabkan harga bahan makanan relatif lebih mahal dibandingkan daerah lain. Kondisi ini membuat rumah tangga harus mengalokasikan pengeluaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, meskipun jumlah dan kualitas konsumsi belum tentu meningkat secara signifikan.

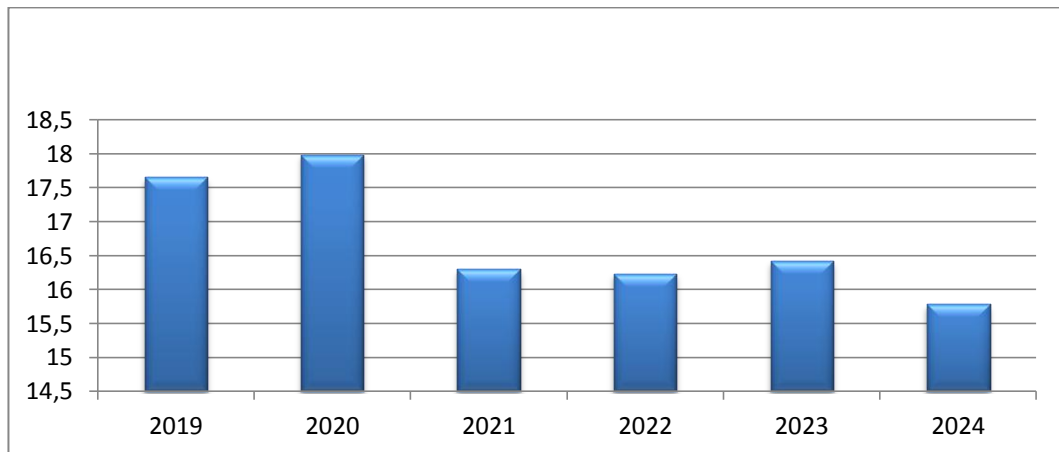
Selain pengeluaran pangan, Kemiskinan juga menjadi salah satu determinan penting. Tingginya kemiskinan mengindikasikan rendahnya kemampuan sebagian masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Kondisi kemiskinan tentu berdampak langsung terhadap kemampuan membeli pangan. Di Maluku, kemiskinan beberapa tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif yang mengindikasikan ketidakstabilan kondisi pasar tenaga kerja. Ketika kemiskinan meningkat, rumah tangga kehilangan sumber pendapatan dan semakin sulit mengakses makanan bergizi dan mencukupi. COVID-19 juga dapat dikatakan menjadi salah satu penyebab kemiskinan kembali meningkat di Indonesia. Kemiskinan dapat memengaruhi kondisi pangan perkapita. Kemiskinan berpengaruh terhadap ketidakmampuan penduduk dalam mencukupi kebutuhan pangan dan kesehatan (Pribadi et al, 2020).

Kemiskinan masih menjadi permasalahan pembangunan yang krusial di Indonesia karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup penduduk. Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan di suatu wilayah adalah persentase penduduk

miskin, yaitu proporsi penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Tingginya kemiskinan menunjukkan masih terbatasnya kemampuan sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan pangan maupun nonpangan, yang layak.

Kemiskinan memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai aspek pembangunan, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Penduduk miskin cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya produktivitas dan pendapatan, sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Oleh karena itu, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai persoalan rendahnya pendapatan, tetapi juga sebagai permasalahan struktural yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Menurut Badan Ketahanan Pangan (2021), kemiskinan merupakan satu faktor yang memengaruhi ketahanan pangan dalam hal akses pangan. Semakin tinggi persentase penduduk miskin pada suatu daerah mengindikasikan daerah tersebut kesulitan dalam mengakses pangan baik rumah tangga maupun individu. Seperti penelitian Afini et al (2025), yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketidakcukupan konsumsi pangan. Tanpa adanya akses ekonomi memadai, rumah tangga dan individu memiliki pilihan terbatas untuk mendapatkan pangan yang beragam.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah (2026)

Gambar 1.3 Kemiskinan di Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 (Persen)

Berdasarkan grafik tingkat kemiskinan Provinsi Maluku tahun 2019–2024, menunjukkan pergerakan persentase penduduk miskin yang bersifat fluktuatif, namun dengan kecenderungan menurun pada akhir periode. Terlihat pada tahun 2019 tingkat kemiskinan berada di sekitar 17,65 persen. Angka ini sudah tergolong cukup tinggi karena hampir seperlima penduduk berada di bawah garis kemiskinan.

Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan meningkat menjadi sekitar 17,99 persen. Kenaikan ini walaupun tidak terlalu besar, tetap menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang cukup terasa. Peningkatan ini dapat disebabkan karena melemahnya aktivitas ekonomi, berkurangnya kesempatan kerja, serta turunnya pendapatan masyarakat pada periode tersebut. Memasuki tahun 2021, terjadi penurunan yang cukup signifikan hingga berada di kisaran 16,3 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya proses pemulihan ekonomi dan mulai membaiknya kondisi pendapatan masyarakat. Pada tahun 2022, angka kemiskinan kembali turun tipis menjadi sekitar 16,23 persen, yang menandakan tren perbaikan masih

berlanjut meskipun tidak terlalu cepat. Namun, pada tahun 2023 terlihat sedikit kenaikan menjadi sekitar 16,42 persen. Kenaikan ini relatif kecil, tetapi tetap menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok atau tekanan inflasi. Selanjutnya, pada tahun 2024 angka kemiskinan kembali menurun hingga sekitar 15,78 persen, yang menjadi capaian terendah selama enam tahun terakhir.

Jika dilihat dari keseluruhan periode 2019–2024, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku mengalami dinamika yang tidak sepenuhnya stabil, tetapi arah pergerakannya cenderung menurun dalam jangka menengah. Meskipun penurunannya tidak drastis, tren ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat secara bertahap. Masalah kemiskinan masih menjadi tantangan serius di Provinsi Maluku. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku masih perlu difokuskan secara lebih merata. Menurut Streeten (1979), kemiskinan yaitu kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum yang paling mendasar untuk hidup layak. Seseorang dapat dikategorikan miskin apabila kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, meskipun ia masih memiliki pendapatan.

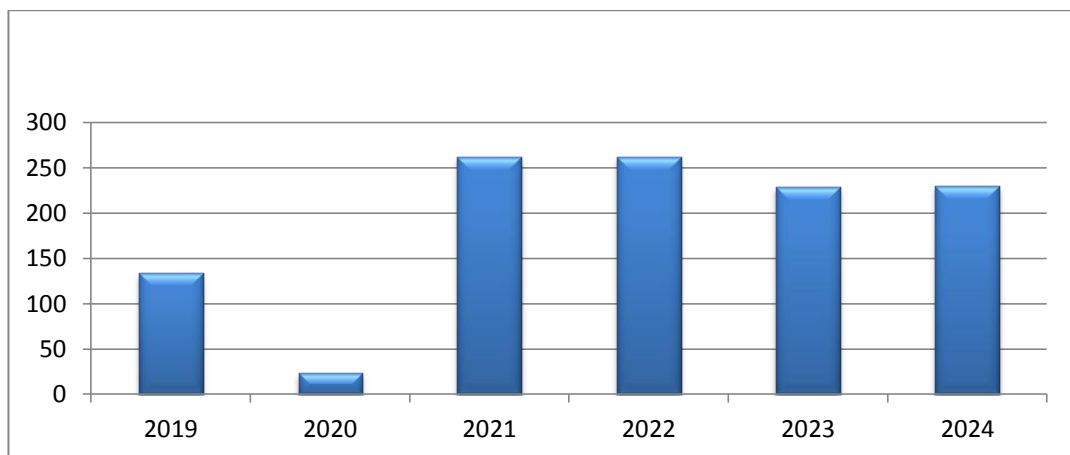
Kemudian penelitian Mardison (2020) menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketidakcukupan konsumsi pangan, artinya ketika kemiskinan meningkat maka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pun akan ikut meningkat. Setiap kenaikan satu persen persentase penduduk miskin akan meningkatkan persentase ketidakcukupan konsumsi pangan. Penduduk

miskin yang tergolong dengan status tidak cukup pangan disebabkan karena banyaknya tanggungan dan mereka memilih mengurangi alokasi pengeluaran nya untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. (Arrohmah et al, 2023).

Kemudian belanja bantuan sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang dirancang untuk melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan dari risiko kerawanan pangan. Kebijakan ini bermula dari pemahaman bahwa pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan secara fisik, tetapi juga oleh kemampuan ekonomi rumah tangga dalam mengakses pangan tersebut. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kelaparan, berbagai program bantuan sosial telah diimplementasikan, termasuk bantuan sosial pangan. Bantuan sosial diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta menjamin akses pangan minimum bagi kelompok sasaran.

Perlindungan sosial dipandang sebagai serangkaian kebijakan dan program yang dirancang untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi dampak risiko tersebut, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Perlindungan sosial tidak hanya bertujuan membantu masyarakat bertahan hidup, tetapi juga menjaga kualitas hidup agar tetap layak. Teori Perlindungan Sosial yang dikemukakan oleh Armando Barrientos (2013), menjelaskan bahwa negara memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial dan ekonomi yang dapat menurunkan kesejahteraan hidup, seperti kemiskinan, kehilangan pekerjaan, krisis ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta kerawanan pangan. Merujuk

pada penelitian yang dilakukan oleh Teapon et al (2024) menyatakan bahwa bantuan sosial berpengaruh negatif terhadap ketidakcukupan konsumsi pangan, bantuan sosial dapat membantu menurunkan ketidakcukupan konsumsi pangan.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah (2026)

**Gambar 1.4 Belanja Bantuan Sosial di Provinsi Maluku
Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)**

Berdasarkan grafik belanja bantuan sosial Provinsi Maluku tahun 2019–2024, Jika dilihat dari tinggi batang setiap tahun, terlihat bahwa alokasi anggaran bansos mengalami perubahan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, belanja bantuan sosial berada di kisaran sekitar 130 miliar rupiah. Memasuki tahun 2020, terjadi penurunan yang sangat tajam hingga berada di bawah 50 miliar rupiah. Penurunan drastis ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan atau pergeseran prioritas anggaran pada tahun tersebut.

Namun pada tahun 2021, belanja bansos meningkat secara signifikan hingga mencapai sekitar 260 miliar rupiah. Kenaikan ini merupakan lonjakan yang sangat besar dibandingkan tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terlihat pada tahun 2022, di mana anggaran bansos tetap berada pada angka tinggi

Kondisi ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial masyarakat. Pada tahun 2023, belanja bantuan sosial mengalami penurunan menjadi sekitar 229 miliar rupiah. Meskipun turun, nilainya masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 dan jauh lebih besar dibandingkan tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2024, anggaran bansos kembali mengalami sedikit kenaikan menjadi sekitar 230 miliar rupiah.

Secara keseluruhan, grafik 1.4 menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial di Provinsi Maluku bersifat fluktuatif. Setelah sempat turun tajam pada tahun 2020, anggaran bansos meningkat drastis pada tahun 2021–2022, kemudian sedikit menurun namun tetap berada pada level yang relatif tinggi hingga 2024. Pola ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial cukup responsif terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam periode pemulihan ekonomi.

Belanja bantuan sosial di Maluku juga tidak terlepas dari tantangan struktural daerah, seperti keterbatasan produksi pangan lokal dan tingginya biaya distribusi antar pulau. Kondisi ini membuat harga pangan mudah berfluktuasi, sehingga rumah tangga berpendapatan rendah sangat rentan terhadap perubahan harga. Oleh karena itu, belanja bantuan sosial pangan berfungsi sebagai alat stabilisasi sosial untuk mencegah penurunan konsumsi pangan dan memperkecil risiko ketidakcukupan konsumsi pangan di masyarakat.

Menurut Temple et al (2019), peningkatan pemberian bantuan sosial melalui beberapa program mampu meningkatkan sumber daya material rumah tangga rawan pangan, sehingga dapat memperbaiki masalah kerawanan pangan

pada rumah tangga. Bantuan sosial pangan seperti BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau program bantuan beras ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga penerima manfaat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ritonga et al (2025) menyatakan bahwa bantuan sosial berpengaruh negatif terhadap ketidakcukupan konsumsi pangan, semakin banyak dana yang dikeluarkan untuk bantuan sosial, maka akan membantu menurunkan ketidakcukupan konsumsi pangan.

Namun menurut Geubrina et al (2025) efektivitas bantuan sosial ini bergantung pada jumlah anggaran, ketepatan sasaran, keteraturan penyaluran, dan kecukupan manfaat yang diterima oleh rumah tangga. Karena dengan bansos juga bisa menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan tersebut, kondisi itu tidak akan mengubah masyarakat yang menerima bantuan lebih berdaya dan mampu mengembangkan potensi mereka. Seperti penelitian Iwang et al (2024) yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh positif, dan penelitian yang dilakukan oleh Kharisma et al (2025) juga berpengaruh positif terhadap ketidakcukupan konsumsi pangan. Artinya, ketika bansos meningkat, maka cenderung diikuti dengan peningkatan PoU, namun pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik, karena bantuan sosial yang diberikan belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan masalah kekurangan konsumsi pangan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan dan ketidakcukupan konsumsi pangan, baik di tingkat nasional maupun regional. Sebagian besar studi menekankan peran

variabel sosial ekonomi seperti pendapatan atau pengeluaran rumah tangga, produksi padi, serta tingkat kemiskinan dalam memengaruhi konsumsi pangan.

Namun, penelitian tersebut umumnya dilakukan pada skala nasional atau menggunakan pendekatan mikro rumah tangga, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika ketidakcukupan konsumsi pangan di tingkat daerah, khususnya pada provinsi dengan karakteristik geografis kepulauan seperti Provinsi Maluku. Selain itu, kajian yang secara khusus mengintegrasikan variabel pengeluaran makanan perkapita, kemiskinan, dan belanja bantuan sosial dalam satu kerangka analisis empiris masih relatif terbatas. Perbedaan hasil temuan penelitian sebelumnya terkait arah dan signifikansi pengaruh variabel-variabel tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi empiris yang perlu dikaji lebih lanjut dengan pendekatan dan konteks wilayah yang lebih spesifik.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang secara signifikan memengaruhi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Maluku selama periode 2019–2024. Analisis ini tidak hanya akan memberikan gambaran empiris mengenai kondisi ketahanan pangan di daerah, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kerentanan pangan, dan mendukung pencapaian SDG 2: *Zero Hunger* secara berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka penelitian ini memiliki identifikasi masalah antara lain :

1. Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Makanan Perkapita, Kemiskinan, dan Belanja Bantuan Sosial secara parsial terhadap Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Provinsi Maluku tahun 2019-2024?
2. Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Makanan Perkapita, Kemiskinan, dan Belanja Bantuan Sosial secara simultan terhadap Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Provinsi Maluku tahun 2019-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Makanan Perkapita, Kemiskinan, dan Belanja Bantuan Sosial secara parsial terhadap Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Provinsi Maluku tahun 2019-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Makanan Perkapita, Kemiskinan, dan Belanja Bantuan Sosial secara simultan terhadap Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Provinsi Maluku tahun 2019-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Berdasarkan penjelasan yang sudah dibahas dalam penelitian ini maka kegunaan penelitian bagi pengembangan ilmudapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan pengembangan mengenai ketidacukupan konsumsi pangan. Selain

itu, penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh pengeluaran makanan perkapita, kemiskinan, dan bantuan sosial pangan di provinsi Maluku.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang serupa, baik dengan menambah variabel lain, memperluas objek penelitian, atau menggunakan metode analisis yang lebih kompleks.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rujukan sebagai dasar dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Dengan mengetahui pengaruh pengeluaran makanan perkapita, kemiskinan, dan bantuan sosial pangan, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik dalam meningkatkan daya beli masyarakat, menekan angka kemiskinan, maupun mengevaluasi efektivitas penyaluran bantuan pangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Provinsi Maluku meliputi seluruh kabupaten/kota sebagai unit analisis, yang terdiri 11 Kabupaten/Kota yaitu Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Buru, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kota Ambon, dan Kota Tual.

